

DAFTAR PUSTAKA

- Aramide, S. F., & Bashir, M. M. (2015). The Effectiveness Of Internal Control System and Financial Accountability at Local Government Level in Nigeria. *IMPACT: International Journal of Research in Business Management (IMPACT: IJRBM)*.
- Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64–69. <https://doi.org/10.18196/jati.010207>
- Fitra, Amanda . 2016. “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).” Universitas Gadjah Mada.
- Jauhari, Arief, Hasan Basri, and M. Shabri. 2015. “Penerapan Good Governance Berbasis E-Government Dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh.” *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah* 4(3): 57–70.
- Jensen, Michael C, and W. Meckling. 1976. “Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.” *Journal of Financial Economics* 3: 305–60.
- Kartika, Ayu, Putu Nomy Yasintha, Kadek Wiwin, and Dwi Wismayanti. 2018. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus : Desa Pemecutan Kaja , Kecamatan Denpasar Utara).” *Jurnal Citizen* 1(1).
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Des: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Ekonomika-Bisnis*.
- Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Penerbit : Yayasan Rumah Peneleh, Jakarta Selatan
- Laksmi, A. C. (2015). *Continuing Professional Development For The Auditing*

Profession: Evidence From Indonesia. RMIT University.

Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Kedepan*. Jakarta: Grasindo.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

McCracken, G. (1988). *The Long Interview*. Newbury Park: Sage Publications Inc.

Ngongare, Yanis. 2016. "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan." *Jurnal Eksekutif* 1(8).

Ott, K., Petrušić, M., Bronić, M., & Stanić, B. (2016). Budget Transparency In Croatian Counties, Cities And Municipalities (November 2015 – March 2016).

Putri, M., Suharno, & Widarno, B. (2018). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14, 69–75. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2016.02.036>

Rahayu, Depi. 2017. "Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Economics Development Analysis Journal* 6(2).

Reflay Ade Sagita, W. (2017). Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 293–306. <https://doi.org/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/1862/1406>

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,*
- Wenda, G. (2017). Pengelolaan Dana Desa: Studi kasus di Desa Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Karanganyar.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*.
- Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016. “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323–40
- Weber, Max. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. Penerjemah A.M. Henderson dan T. Parsons. Chicago: Free Press.
- BBC News Indonesia. 2017. Tanpa dihadiri SBY, pidato Jokowi akui pembangunan 'belum merata'. Diunduh tanggal 27 Oktober 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/Indonesia-40945046.amp>
- AccuWeather.2020.
<https://www.accuweather.com/id/id/pasirangin/3450279/december-weather/3450279>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2009 Tentang PedomanPerencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2014 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.